

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANGHARI DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Batanghari

Kabupaten Batanghari yang menjadi lokasi penelitian ini terletak di bagian tengah Provinsi Jambi dengan luas Wilayah 5.804,83 km². Kabupaten Batanghari secara geografis terletak pada posisi 1°15' sampai dengan 2°2' Lintang Selatan dan diantara 102°30' Bujur Timur sampai dengan 104°30' Bujur Timur. Dalam lingkup provinsi, letak Kabupaten Batanghari berada di wilayah bagian tengah provinsi dan merupakan daerah perbukitan.

Kabupaten Batanghari merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi yang resmi berdiri pada 1 Desember 1948. Ibu kota kabupaten Batanghari berada di Kecamatan Muara Bulian. Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten ini berjumlah 301.700 jiwa, dengan kepadatan 52 jiwa/km².⁴² Sampai tahun 2021, sudah ada 15 orang yang pernah menjabat Bupati Batanghari, dimana saat ini dijabat oleh Mhd. Fadhil Arief (mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi) hasil dari Pilkada 2020 lalu berpasangan dengan Bakhtiar (mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari).

Kabupaten Batanghari dibentuk pada 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U, tanggal 30 Nopember 1948 dengan pusat pemerintahannya di Kota Jambi. Pada tahun 1963,

⁴² <https://www.batangharikab.go.id/bat/>. Akses tanggal 30 November 2021.

pusat pemerintahan daerah ini dipindahkan ke Kenali Asam, 10 km dari Kota Jambi.

Kemudian pada tahun 1979, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1979, ibu kota kabupaten yang terkenal kaya akan hasil tambang ini pindah dari Kenali Asam ke MuaraBulian, 64 km dari Kota Jambi sampai saat ini.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Batanghari sebagai wilayah tertua di Provinsi Jambi berbatasan dengan:⁴³

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumsel
- Sebelah Timur : Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebelah Barat : Kabupaten Tebo.

Wilayah Kabupaten Batanghari dilalui oleh dua sungai besar yaitu Sungai Batang Tembesi dan Sungai Batanghari. Beberapa sungai lainnya yang relatif besar antara lain adalah Sungai Dangun Bangko, Sungai Kayu Aro, Sungai Rengas, Sungai Lingkar, Sungai Kejasung Besar, dan Sungai Jebak. Disamping sungai besar tadi, terdapat pula beberapa sungai kecil yang merupakan anak-anak sungai yaitu Sungai Aur, Sungai Bacang dan lain-lain. Sungai Batanghari yang menjadi sungai utama di wilayah ini dapat dijadikan sebagai sumber kebutuhan air bersih dan sumber untuk pertanian sawah, dengan demikian Sungai Batanghari mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat. Sungai Batanghari disamping dapat menghasilkan berupa perikanan dan pertambangan pasir – batu juga digunakan

⁴³ <https://www.batangharikab.go.id/bat/>. Akses tanggal 30 November 2021

sebagai prasarana transportasi, prasarana irigasi, dan sumber air baku. Kondisi hidrologi, wilayah Kabupaten Batanghari dipengaruhi oleh DAS Batanghari dan DAS Batang Tembesi.

Wilayah administrasi Kabupaten Batanghari terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yang meliputi 13 (tiga belas) Kelurahan dan 100 (seratus) Desa dengan berbagai perbedaan perkembangan, baik karena potensi geografis, sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun karena pembangunan prasarana pada masing-masing kecamatan dan antar kecamatan. Dilihat dari aspek geografis, Kabupaten ini mempunyai letak yang strategis karena merupakan lalu lintas yang menghubungkan kawasan barat Sumatera.

Tabel 1.2

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Batanghari

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Ha)	(% thd Total)	(Ha)	(% thd Total)
Maro Sebo Ulu	14	906,33	15,61	-	-
Mersam	16	801,90	13,82	-	-
Batin XXIV	16	904,14	15,58	-	-
Muara Tembesi	13	419,77	7,23	-	-
Maro Sebo Ilir	7	129,06	2,22	-	-
Muara Bulian	20	417,97	7,20	-	-
Bajubang	9	1.203,51	20,73	-	-
Pemayung	18	1.022,51	17,61	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Batanghari, 2020

2.2. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Batanghari yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan merupakan

bagian dari PKB secara nasional. Secara struktural, DPC PKB Kabupaten Batanghari merupakan bagian dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB tingkat Provinsi Jambi. Karenanya, eksistensi PKB di Kabupaten Batanghari sangat terkait dengan DPW PKB Provinsi Jambi dan DPP PKB di tingkat pusat (Jakarta).

Kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam kancah perpolitikan Indonesia tidak terlepas dari kondisi sosial politik Tanah Air pasca tumbangannya rezim Orde Baru. Pasca lengsernya Presiden Soeharto, Indonesia bisa dikategorikan akan menatap masa depan yang lebih baik dengan lahirnya sebuah rezim reformasi yang merupakan bagian dari perjuangan rakyat Indonesia untuk melakukan kehidupan yang bebas dalam berdemokrasi. Di antara perubahan sangat signifikan yang dapat disorot perubahan dalam bidang politik di negara Indonesia, pasca lahirnya era reformasi ini banyak sekali munculnya semangat baru dalam hal perbaikan sistem politik yang diakibatkan sistem politik di era orde baru memiliki sistem otoriter, sehingga kondisi perpolitikan pada era reformasi tersebut Indonesia memiliki perubahan dengan menganut sistem multipartai yang tidak terbatas.⁴⁴

Undang-Undang yang mengatur tentang sistem multi partai adalah Undang-Undang No 2 Tahun 1999 yang berbunyi “ Perubahan dari Sistem multipartai terbatas menjadi sistem multi partai tidak terbatas, sehingga jumlah partai politik yang tadinya dibatasi hanya 3 yakni PDI, PPP, dan Golkar menjadi tidak terbatas jumlahnya”. Dalam dokumen Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pada

⁴⁴ Fanny Dwi Putra Pamungkas dan Wisnu, ‘Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Sebagai Kekuatan Politik Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2000-2015’, *Avatara: e-jurnal pendidikan sejarah*, Vol. 10, No. 3, 2021.

tahun 1999 setidaknya terdapat 141 partai politik yang akan mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilu tahun 1999, namun diantara jumlah tersebut hanya sebanyak 48 partai politik yang dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan untuk kontestasi pemilu tahun 1999. Padatahun 2004 terdapat 50 partai politik yang mendaftarkan diri dan hanya terdapat sebanyak 24 partai politik yang dapat mengikuti perhelatan pemilu pada tahun 2004 tersebut. Sedangkan pada tahun 2009 total terdapat 38 partai politik yang telah mendaftarkan diri pada kontestasi pemilu tahun 2009.⁴⁵

Dari sistem multipartai tidak terbatas tersebut, yang merupakan cikal bakal berdirinya partai politik yang mempunyai kedekatan dan identitas yang melekat sebagai partai politiknya Kyai dan Ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Partai Kebangkitan Bangsa resmi didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 bertempat di Jakarta setelah sesaat bangsa Indonesia keluar dar rezim orde baru dan transisi ke reformasi, dan merupakan salah satu partai yang mampu bersaing secara langsung dengan beberapa partai yang juga didirikan pasca orde baru maupun partai yang telah lama berdiri. Partai Kebangkitan Bangsa tersebut banyak dipersepsikan merupakan sebuah sayap politik dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama karena dilihat dari tokoh-tokoh yang menjadi deklaratornya merupakan kyai dan ulama yang menjadi tonggak penting dalam organisasi masyarakat Nadhlatul Ulama seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri dan A. Muhith Muzadi, sehingga hal ini nantinya akan membawa dampak yang luar biasa bagi

⁴⁵ Lili Romli, 'Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia, *Jurnal Politica*, Vol, 2, No. 2, November 2011, Hal. 200.

perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di jajaran nasional maupun di daerah.

Meskipun demikian, representasi dari berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa tidak bisa dikorelasikan dengan kembalinya Nahdlatul Ulama dalam kancah perpolitikan di Indonesia karena hal ini merujuk pada keputusan muktamar NU pada tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo yang menyatakan Nahdlatul Ulama telah resmi keluar dari partai politik sehingga kembali kekhittah tahun 1926 sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang Agama, Sosial, Pendidikan, dan Ekonomi.

Runtuhnya rezim Orde Baru di tahun 1998 menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol.⁴⁶ Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya.

⁴⁶ <https://www.pkb.id/page/sejarah-pendirian/>. Akses 25 November 2021

Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.⁴⁷ Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Suryiah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberitugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suryiah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said AqilSiroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima

⁴⁷ Hairus Salim, Uzair Fauzan, Umar Ibnu Sholeh, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan dana partaipolitik, maka Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima. Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman,

H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi. Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah waljamaah. Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A.

Mustofa Bisriserta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.

Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah:

1. Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

2.3. DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batanghari

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat ikut serta dalam pemilu, partai politik harus memiliki kepengurusan di seluruh Indonesia, baik di tingkat

provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai politik yang sah untuk mengikuti pemilu di seluruh Indonesia.

Sebagai upaya memenuhi persyaratan keikutsertaan dalam pemilu, PKB membentuk kepengurusan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Tanah Air. Salah satu wilayah yang dibentuk kepengurusan PKB adalah Provinsi Jambi. Dalam konteks Provinsi Jambi, DPW PKB Provinsi Jambi berdiri seiring dengan dibentuknya kepengurusan partai ini di tingkat pusat (DPP). Saat ini, Ketua DPW PKB Provinsi Jambi dijabat oleh Sofyan Ali untuk kedua kalinya berdasarkan Musyawarah Wilayah PKB tanggal 9 Januari 2021. Pada Pemilu 2019, PKB menempatkan 5 wakilnya di DPRD Provinsi Jambi sehingga membuat partai cukup diperhitungkan dalam percaturan politik di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Setelah kepengurusan tingkat Provinsi Jambi berhasil dibentuk, maka PKB kemudian membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi, salah satunya di Kabupaten Batanghari. Pada konteks Kabupaten Batanghari, kehadiran PKB juga erat kaitannya dengan apa yang terjadi di tingkat provinsi dan nasional. Sebagai salah satu syarat untuk bisa mengikuti serangkaian pemilu, pendirian PKB di Kabupaten Batanghari menjadi mutlak dilakukan. Hal ini membuat keberadaan PKB di Kabupaten Batanghari dapat dikatakan didirikan di masa-masa awal reformasi, seiring dengan pendiriannya di tingkat Provinsi Jambi.

Terkait dengan dukungan terhadap calon dalam kontestasi Pilkada, DPC PKB Kabupaten Batanghari identik dengan calon kepala daerah yang berasal dari kalangan birokrat. Hal ini terlihat pada dua pelaksanaan Pilkada pasca reformasi.

Pada Pilkada Batanghari 2015, PKB mengusung Ardian Faisal – M. Qomaruddin bersama Nasdem dan Hanura. Ardian Faisal yang diposisikan sebagai Calon Bupati merupakan birokrat yang pernah mengisi beberapa jabatan kepada dinas di Pemerintah Kabupaten Batanghari dan terakhir sebagai Wakil Bupati Batanghari 2010-2015. Pada Pilkada Batanghari 2020, PKB kembali mengusung Calon Bupati yang berasal dari kalangan birokrat, yaitu M. Fadhil Arief sebagai mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 1.3

**Daftar Nama Pasangan Calon, Latar Belakang, dan Partai Politik Pengusung
Pilkada Batanghari 2015**

No	Nama Kandidat	Latar Belakang Kandidat	Partai Politik Pengusung
1	Ardian Faisal – M. Qomaruddin	Birokrat - Pengusaha	Nasdem, PKB, Partai Hanura.
2	Syahirsyah – Sofia Joesoef	Politisi - Pengusaha	Gerindra, Golkar.
3	Camelia Puji Astuti – HM. Amin	Pengusaha – Tokoh Publik	Demokrat, PKS.
4	Sinwan – Arzanil	Politisi - Pengusaha	PDI-P, PAN

Sumber: KPU Kab. Batanghari, 2015.

Tabel 1.4

**Daftar Nama Pasangan Calon, Latar Belakang, dan Partai Politik Pengusung
Pilkada Batanghari 2020**

No	Nama Kandidat	Latar Belakang Kandidat	Partai Politik Pengusung
1	Yunninta Asmara - Muhammad Mahdan	Pengusaha - Politisi	Golkar, Gerindra, PDI-P, Perindo.
2	Muhammad Firdaus – Camelia Puji Astuti	Dokter ASN – Pengusaha	PAN, Demokrat, PKS.
3	M. Fadhil Arief – Bakhtiar	Birokrat	PKB, Nasdem, PPP.

Sumber: KPU Kab. Batanghari, 2020.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24221/DPP-3/VI/A.1/X/2017 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat PKB, kepengurusan DPC PKB Kabupaten Batanghari Periode 2017-2022 dipimpin oleh Elpisina (Ketua) dan Musyahrial (Sekretaris). Berdasarkan Pemilu 2019, PKB menempatkan 4 wakilnya di DPRD Kabupaten Batanghari sehingga membuat partai ini cukup diperhitungkan dalam perpolitikan wilayah tertua di Provinsi Jambi ini. Besaran jumlah kursi ini sama dengan perolehan PKB pada gelaran Pemilu 2014 yang menempatkan partai warga nahdiyin ini mendapatkan empat kursi.

Tabel 1.5
Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Batanghari Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa 2019-2024

No	Nama
1	Patoni, SE
2	Banu Aziz
3	Ilhamsyah
4	Ilhamuddin

Sumber: KPU Kab. Batanghari, 2021.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa posisi politik PKB di Kabupaten Batanghari sangat diperhitungkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Hal ini karena syarat untuk dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Batanghari minimal mendapatkan dukungan sembilan kursi DPRD. Dengan perolehan empat kursi di DPRD Kabupaten Batanghari, PKB menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi calon kepala daerah yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah.

Posisi politik PKB dengan perolehan empat kursinya di DPRD Kabupaten Batanghari ini membuat salah satu calon kepala daerah, M. Fadhil Arief, tertarik untuk mencoba peruntungan dengan partai politik besutan Gus Dur ini sebagai kendaraan politiknya. Untuk memenuhi persyaratan pencalonan, M. Fadhil Arief kemudian menggandeng PPP dan Partai Nasdem. Dengan dukungan empat kursi PKB, ditambah PPP dan Partai Nasdem masing-masing empat kursi, maka M. Fadhil Arief maju sebagai Calon Bupati Batanghari pada Pilkada Serentak 2020 berpasangan dengan Mantan Sekretaris Daerah, Bakhtiar.